

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK REKLAME DAN PAJAK HOTEL  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN  
BANYUMAS**

Oleh

Regita Tias Setiatri, Dra. Hesti Lestari, MS

**DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU  
POLITIK UNIVERSITAS  
DIPONEGORO**

Jalan Profesor Haji Sudarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos  
1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman :

<https://fisip.undip.ac.id/> [email.fisip.undip.ac.id/](mailto:email.fisip.undip.ac.id/)

**ABSTRACT**

*Tax is one of the public role in regional autonomy and revenue in an effort to regional development. Tax is one of the biggest sources of income for the regions. The existence of tax also contribute to the economic growth and national development. Nation. Taxes provide a great role so that the Indonesian government continue to improve and optimize nilai-nilai as sources of income tax and revenue for the country. An advertisement tax and hotel tax is two out of eleven local taxes in the district of Banyumas included into the genuine revenue (PAD). Both the tax is a tax where the number of potential investors, a vendor, the tourism and hotels that are increasingly multiply in the Banyumas regency. Total revenues up and down and the realization that does not meet the target is a problem of the two tax. Revenue in the Banyumas regency 2017 hit a slump in years a keen. On the basis of a decrease in the amount of revenue Banyumas regency absorbing not maximal. Research aims to understand how big the influence of advertisement tax and the hotel on local revenue ( PAD ) Banyumas regency. This study using quantitative methods involving 56 respondents that is the employee badan banyumas financial districts. Based on the research, advertisement tax and tax hotel has an effect on local revenue of 17 %. While advertisement tax and the hotel simultaneously influence on local revenue. Recommendations or suggestions of the research that the agency should improve the supervision to the financial taxpayers advertisement the tax payers from hotel.*

***Keywords: advertisement , the hotel , local revenue***

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desentralisasi otonomi daerah membawa perubahan besar bagi tata laksana pemerintahan negara Indonesia. Bentuk pemerintahan sentralistik yang terus dikritik pada akhirnya menuntut Indonesia untuk melakukan pergeseran kebijakan kewenangan. Adanya desentralisasi, setiap daerah di Indonesia dilimpahi kewenangan untuk mengelola potensi sumber daya yang mereka miliki.

Penetapan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan disahkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan banyak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintah.

Penerimaan Negara dari sektor pajak adalah pendapat yang diterima Negara dari kontribusi masyarakat kepada Negara. Pajak merupakan salah satu peran masyarakat dalam pelaksanaan otonomi dan pendapatan asli daerah dalam upaya pembangunan

daerah. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi daerah. Keberadaan pajak juga mendorong adanya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Nasional Bangsa.

Berdasarkan jenisnya, pajak terdiri dari pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009).

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 pasal 5 yang menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan asli daerah (PAD), yaitu :
  - a. Hasil pajak daerah
  - b. Hasil retribusi daerah
  - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan

- kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah
2. Dana perimbangan, yaitu :
    - a. Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam
    - b. Dana alokasi umum
    - c. Dana alokasi khusus
  3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang mendapatkan pendapatan dari pengelolaan sumber daya di daerahnya. Salah satu sumber penerimaan terbesar adalah dari pajak daerah. Bentuk pengelolaan pajak daerah tersebut di kelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas merupakan institusi yang merumuskan dan menyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang

tertuang di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan/Bupati Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyumas dari tahun ke tahun semakin berkembang diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyumas. Bertumbuhnya pembangunan daerah khususnya secara fisik yang didirikan di Kabupaten Banyumas, maka akan semakin mendukung berkembangnya perekonomian di Kabupaten tersebut.

Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya pajak daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak daerah diharapkan menjadi salah satu kontribusi yang positif terhadap PAD dalam hal pencapaian dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Purwokerto sebagai tempat kedudukan pembantu Provinsi Jawa Tengah untuk wilayah Kabupaten Banyumas yang sangat berkembang karena ditunjang dari letak strategis

dan pada akhirnya mengundang minat berbagai investor yang masuk untuk berinvestasi di Kabupaten Banyumas. Investor yang ada di Kabupaten tersebut tentu berupaya menarik minat masyarakat. Di dalam perdagangan dibutuhkan wadah untuk pemasaran produk lewat media cetak maupun media elektronik mengingat jumlah penduduk Kabupaten Banyumas yang relatif besar dan berpotensi sebagai konsumen produk yang dipasarkan tersebut. Media cetak dan elektronik, dijadikan sebagai modal besar bagi investor dan salah satu yang paling diminati oleh pengguna adalah pemasaran lewat media reklame.

Media reklame dianggap sebagai pilihan paling alternatif dalam pemasaran karena dianggap menguntungkan dan sangat efektif. Reklame mampu menarik calon konsumen karena reklame dapat diakses oleh berbagai pihak. Hal tersebut menjadikan reklame sebagai salah satu yang harus diperhatikan oleh pemerintah, baik dalam hal pemberian aturan dan tarif pemasangan reklame yang diatur oleh undang-undang maupun peraturan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum. Pajak Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

Pajak reklame di Kabupaten Banyumas yang semakin tinggi pendapatannya karena bertambahnya objek pajak dan wajib pajak, pajak hotel tidak kalah mencolok dan menjadi pajak primadona yang pendapatannya dapat diandalkan oleh pemerintah kabupaten Banyumas. Pendapatan pajak ini mengalami penerimaan yang tinggi. Hal tersebut tidak lain lantaran jumlah hotel yang terus bertambah di kabupaten Banyumas pada setiap tahunnya.

Peningkatan wisatawan yang berkunjung serta event budaya yang banyak diselenggarakan di Kabupaten Banyumas untuk menarik

para wisatawan mengakibatkan permintaan atas tempat penginapan sementara bagi para wisatawan luar kota maupun luar negeri semakin meningkat. Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung, para investor dan para wirausaha yang terjun di bisnis perhotelan juga meningkat. Dengan demikian, sekarang dapat dilihat sisi sudut Kabupaten Banyumas mulai banyak pembangunan hotel. Pajak hotel di Kabupaten Banyumas sesungguhnya telah diatur dalam peraturan daerah (perda) nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Banyumas dan peraturan bupati (perbup) Banyumas nomor 64 Tahun 2013 tentang tata cara pemungutan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Banyumas.

Pajak reklame dan pajak hotel adalah dua dari sebelas pajak daerah di Kabupaten Banyumas yang merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyumas. Di dalam kurun waktu lima tahun terakhir beberapa kali pemerintah Kabupaten Banyumas merevisi bahkan membuat regulasi baru terhadap kedua pajak tersebut.

Hal ini seperti peraturan daerah nomor 1 tahun 2011 yang terakhir berubah menjadi peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 mengenai pajak reklame peraturan daerah nomor 1 tahun 2011 yang berubah menjadi peraturan daerah nomor 9 tahun 2013 mengenai pajak hotel. Hal tersebut bukan tanpa alasan sebab kedua pajak ini merupakan pajak yang potensial dimana jumlah investor, *vendor*, tempat pariwisata dan hotel yang semakin bertambah banyak jumlahnya di Kabupaten Banyumas. Dengan demikian pemerintah Kabupaten Banyumas berupaya mengoptimalkan penerimaan kedua pajak tersebut melalui pembuatan dan revisi dari regulasi.

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyumas di tahun 2017 mengalami kemerosotan yang tajam dari 726.313.419.910,00 menjadi 619.495.417.819,00. Atas dasar penurunan tersebut maka penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Banyumas menjadi tidak maksimal, padahal banyak sekali sumber-sumber daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyumas.

Dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh penerimaan pajak reklame dan pajak hotel di Kabupaten Banyumas terhadap Pendapatan Asli Daerah. Maka dari itu, penulis mengambil judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Banyumas”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana pengaruh penerimaan pajak reklame dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Banyumas?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$  terhadap Y)
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah ( $X_2$  terhadap Y)

3. Mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Reklame dan Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$  dan  $X_2$  terhadap Y)

#### **D. Kajian Teori**

##### 1. Administrasi Publik

Administrasi Publik menurut Chandler dan Plano (dalam T.Keban, 2008:3) adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Henry (dalam Pasolong, 2014:8) mendefinisikan Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan beberapa ahli dapat ditarik kesimpulan, bahwa administrasi publik merupakan kombinasi kompleks antara teori dan praktik yang dilakukan oleh

sekelompok orang atau lembaga, untuk mencapai tujuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

2. Parker (dalam Keban, 2014:91) mendefinisikan manajemen merupakan sebagai suatu proses pencapaian hasil melalui orang lain. Di dalam manajemen, terdapat fungsi-fungsi manajemen yang merupakan serangkaian kegiatan yang dijalankan berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Menurut Nickels, McHugh and McHugh (dalam Sule dan Saefullah, 2010:8), fungsi-fungsi manajemen memiliki empat fungsi, yaitu:

1. Perencanaan atau *Planning*
2. Pengorganisasian atau *Organizing*
3. Pengimplementasian atau *Directing*
4. Pengendalian dan Pengawasan atau *Controlling*

Manajemen Publik adalah studi interdisiplin dari aspek-aspek umum organisasi dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing* dan *controlling* satu sisi dengan sumber

daya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan politik disisi lain. Posisi efektivitas program berada pada pengawasan atau *controlling*, untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan berjalan sesuai target yang diharapkan atau tidak.

### 3. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian kegiatan pengendalian kegiatan keuangan dan yang melaksanakan kegiatan tersebut sering disebut sebagai *manajer keuangan* (dalam Husnan dan Pudjiastuti, 2012: 4). Menurut James C. Van Horne dan John Wachowicz, Jr (dalam Horne dan Wachowicz 2012:2) Manajemen keuangan berkaitan dengan perolehan aset, pendanaan, dan manajemen aset dengan didasari beberapa tujuan umum.

Menurut teori dari George R. Terry (Sukarna, 2011: 3), manajemen keuangan memiliki 4 kegiatan yang dikenal dengan singkatan POAC yaitu *Planning*, *Organizing*, *Actuating* dan *Controlling*. Setiap singkatan tersebut

memiliki arti masing-masing dan sangat berperan penting bagi jalannya manajemen keuangan pada sebuah lembaga maupun perusahaan. Planning merupakan sebuah perencanaan dalam menyusun manajemen keuangan dan itupun harus dilakukan beberapa pertimbangan. Organizing adalah melakukan pengorganisasian. Di dalam suatu perusahaan akan dibentuk sebuah bagan organisasi yang di dalamnya terdiri dari berbagai jabatan. Actuating adalah setiap perencanaan pengorganisasian harus direalisasikan dalam bentuk kerja keras dan kerjasama. Terakhir adalah Controlling, yang dimana manajemen keuangan perusahaan pasti memerlukan pengawasan. Pengawasan ini bertujuan agar seluruh keuangan perusahaan bisa tersusun dengan rapih.

Berdasarkan penjelasan dari ahli-ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah kegiatan merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengawasi aktivitas finansial seperti pengadaan dan pemanfaatan dana perusahaan. Manajemen keuangan juga berarti menerapkan prinsip manajemen umum

terhadap sumber daya keuangan perusahaan. Sistem manajemen keuangan di Indonesia dapat digambarkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

#### **E. Metode Penelitian**

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif eksplanatori.

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen yaitu Pajak Reklame sebagai ( $X_1$ ) dan Pajak Hotel sebagai ( $X_2$ ) sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah sebagai ( $Y$ ).
2. Penelitian ini digunakan Hipotesis Asosiatif. Berikut perumusan hipotesis dalam penelitian ini:
  - a. Hipotesis Nol ( $H_0$ )  
Tidak ada hubungan yang signifikan antara Pajak Reklame dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banyumas.
  - b. Hipotesis Alternatif ( $H_a$ )  
Ada hubungan yang signifikan antara Pajak Reklame dan Pajak



Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banyumas.

### 3. Definisi Operasional Variabel

- a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Pajak Reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.
- c. Pajak Hotel merupakan pungutan daerah atas pelayanan hotel. Sedangkan

hotel merupakan bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

### 4. Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini yaitu instansi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas Sampel di dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *Probability Sampling*

### 5. Skala Pengukuran

Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala *Likert* dengan jenis data Ordinal.

### 6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

### 7. Teknik Analisis

- a. Analisis Tabulasi Silang (*Crosstabulation*)
- b. Uji Korelasi Kendall

- c. Uji Koefisien Determinasi
- d. Uji Parsial t
- e. Uji T
- f. Uji F

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **A. Uji Validitas**

Uji validitas  $X_1$ ,  $X_2$  dan Y dalam penelitian ini dinyatakan valid.

### **B. Uji Realibilitas**

Uji realibilitas  $X_1$ ,  $X_2$  dan Y dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.

### **C. Analisis Tabulasi Silang**

1. Tabulasi Silang Antara Pajak Reklame dengan PAD

Hasil analisis tabulasi silang menunjukkan apabila Pajak Reklame tinggi maka Pendapatan Asli Daerah akan tinggi hal ini berarti ada korelasi positif.

2. Tabulasi Silang Antara Pajak Reklame dengan PAD

Hasil analisis tabulasi silang menunjukkan apabila Pajak Hotel tinggi maka Pendapatan Asli Daerah akan tinggi hal ini berarti ada korelasi positif.

### **D. Uji Korelasi Kendall**

Uji Kendall

1. Uji Korelasi Kendall Pajak Reklame dengan PAD

Hasil dari Uji signifikansi menunjukkan nilai signifikan antara pajak reklame dengan pendapatan asli daerah ditunjukkan dengan nilai signifikan sebesar 0.001 dengan analisis korelasi Kendall's tau\_b maka hipotesis diterima yang artinya, terdapat hubungan yang signifikan antara pajak reklame dengan pendapatan asli daerah. Nilai koefisien menunjukkan 0,357 yang artinya hubungan antara pajak reklame dengan pendapatan asli daerah kuat.

Dalam penelitian ini antara pajak reklame dengan pendapatan asli daerah mempunyai hubungan yang erat. Pajak reklame yang meningkat maka pendapatan asli daerah juga akan meningkat.

2. Uji Korelasi Kendall Pajak Hotel dengan PAD

Hasil dari Uji signifikansi pajak hotel dan pendapatan asli daerah menunjukkan nilai signifikan antara pajak hotel dengan pendapatan asli daerah ditunjukkan dengan nilai signifikan sebesar 0.004 dengan analisis korelasi Kendall's tau\_b maka

hipotesis diterima yang artinya, terdapat hubungan yang signifikan antara pajak hotel dengan pendapatan asli daerah. Nilai koefisien pada tabel di atas menunjukkan 0,317 yang artinya hubungan antara pajak hotel dengan pendapatan asli daerah kuat.

Dalam penelitian ini antara pajak hotel dengan pendapatan asli daerah mempunyai hubungan yang erat. Pajak hotel yang meningkat maka pendapatan asli daerah juga akan meningkat.

### E. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi\koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

**Tabel  
Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.413 <sup>a</sup>	.170	.139	1.938

a. Predictors: (Constant), Pajak Hotel ( $X_2$ ), Pajak Reklame ( $X_1$ )

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah (Y)

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat nilai R adalah sebesar 0,413, berarti pengaruh antara variabel Pajak Reklame dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah bersifat positif.

Nilai R Square dari tabel adalah 0,170 atau 17%, hal ini menunjukkan bahwa presentase pengaruh variabel Pajak Reklame

(X<sub>1</sub>) dan Pajak Hotel (X<sub>2</sub>) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 17% sedangkan sisanya 83% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

#### F. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini. Pengujian hipotesis ini menggunakan uji t dan Uji F. Uji t berfungsi untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F berfungsi untuk menguji apakah variabel independen secara simultan (bersamaan) berpengaruh terhadap variabel dependen.

1. Ho diterima jika T hitung ≤ T tabel
2. Ho ditolak jika T hitung > T tabel

Hasil hitung korelasi ganda menggunakan SPSS 22.00 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	40.893	2	20.447	5.443	.007 <sup>b</sup>
Residual	199.089	53	3.756		
Total	239.982	55			

a. Dependent Variable: Y (Pendapatan Asli Daerah)

b. Predictors: (Constant), X<sub>2</sub> (Pajak Hotel), X<sub>1</sub> (Pajak Reklame)

Uji parsial untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung.

Rumus untuk menghitung sumbangan efektif adalah sebagai berikut :

$$SE(X)\% = \beta x \times \text{Koefisien Korelasi} \times 100\%$$

*atau*

$$SE(X)\% = \beta x \times r_{xy} \times 100\%$$

1. Sumbangan Efektif Variabel Pajak Reklame (X<sub>1</sub>) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

$$SE(X_1)\% = \text{Beta } X_1 \times r_{xy} \times 100\% = 0,265 \times 0,357 \times 100\% = 9,5\%$$

2. Sumbangan Efektif Variabel Pajak Hotel (X<sub>2</sub>) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

$$SE(X_2)\% = \text{Beta } X_2 \times r_{xy} \times 100\%$$

$$SE (X_2)\% =$$

$$0,343 \times 0,317 \times 100\%$$

$$SE (X_2)\% = 10,9\%$$

3.  $SE \text{ total} =$

$$SE (X_1)\% + SE(X_2)\%$$

$$SE \text{ total} = 9,5\% + 10,9\%$$

$$SE \text{ total} = 20,4\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka dapat diketahui sumbangan efektif pajak reklame ( $X_1$ ) terhadap pendapatan asli daerah (Y) sebesar 9,5% sedangkan untuk pajak hotel ( $X_2$ ) terhadap pendapatan asli daerah (Y) sumbangan efektifnya lebih tinggi yaitu sebesar 10,9%. Jumlah kontribusi (sumbangan) pajak reklame ( $X_1$ ) dan pajak hotel ( $X_2$ ) terhadap pendapatan asli daerah (Y) sebesar 20,4%.

#### **G. Uji t Variabel Pajak Reklame ( $X_1$ )**

1. T hitung : hasil diperoleh T hitung sebesar 2,111
2. T Tabel : hasil diperoleh untuk T tabel sebesar +1,680 /-1,680.
3. Membandingkan T hitung dengan T tabel

Membandingkan T hitung dengan T tabel Nilai T hitung  $>$  T tabel (2,111  $>$  1,680), maka  $H_0$

ditolak. Berlandaskan sumber penjabaran dapat disimpulkan bahwa, nilai T hitung  $>$  T tabel (2,111  $>$  1,680), maka  $H_0$  ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan antara pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah. Nilai T hitung positif, artinya pengaruh yang terjadi adalah positif, atau dapat diartikan bahwa semakin tinggi atau semakin baik pajak reklame, maka semakin meningkat pendapatan asli daerah.

#### **H. Uji t Variabel Pajak Hotel ( $X_2$ )**

1. T hitung : hasil diperoleh T hitung sebesar 2.726
2. T Tabel : hasil diperoleh untuk T tabel sebesar +1,680 /-1,680.
2. Membandingkan T hitung dengan T tabel

Membandingkan T hitung dengan T tabel Nilai T hitung  $>$  T tabel (2.726  $>$  1,680), maka  $H_0$  ditolak. Berlandaskan sumber penjabaran dapat disimpulkan bahwa, nilai T hitung  $>$  T tabel (2.726  $>$  1,680), maka  $H_0$  ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan antara pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah. Nilai T hitung positif, artinya pengaruh yang terjadi adalah positif, atau dapat diartikan

bahwa semakin tinggi atau semakin baik pajak hotel, maka semakin meningkat pendapatan asli daerah.

#### **F. Uji F**

Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil UjiF dalam penelitian ini yaitu  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu ( $5.443 > 3.170$ ), maka  $H_0$  ditolak, artinya pajak reklame dan pajak hotel secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, dari hasil penelitian di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa uji validitas variabel variabel  $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $Y$  sudah dinyatakan valid karena  $r_{hitung}$  lebih besar dari  $r_{tabel}$ , dimana  $r_{tabel}$  yaitu 0,2632. Uji realibilitas menunjukkan semua variabel mempunyai koefisien lebih dari 0,6, dapat dinyatakan semua variabel dan kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah *reliable*.

Melalui uji tabulasi silang (*crosstabulation*) dapat disimpulkan yaitu apabila pajak reklame tinggi maka akan tinggi pula pendapatan asli daerah yaitu dibuktikan dengan jawaban responden sebesar 87% dengan jumlah responden sebanyak 40 maka artinya hal ini berpengaruh positif. Sementara hasil tabulasi silang dari pajak hotel dengan pendapatan asli daerah yaitu apabila pajak hotel tinggi maka akan tinggi pula pendapatan asli daerah yaitu dibuktikan dengan jawaban responden sebesar 88,6% dengan jumlah responden sebanyak 39 maka artinya hal ini juga berpengaruh positif.

Melalui uji korelasi Kendall's didapat hasil nilai koefisien pajak reklame menunjukkan 0,357 yang artinya hubungan antara pajak reklame dengan pendapatan asli daerah kuat. Hal ini berarti, pajak reklame yang meningkat maka pendapatan asli daerah juga akan meningkat. Sementara, nilai koefisien pada pajak hotel menunjukkan 0,317 yang artinya hubungan antara pajak hotel dengan pendapatan asli daerah juga kuat. Hal ini berarti, pajak hotel yang meningkat

maka pendapatan asli daerah juga akan meningkat.

Berdasarkan hasil perhitungan tabel t parsial maka dapat diketahui pengaruh pajak reklame ( $X_1$ ) terhadap pendapatan asli daerah (Y) sebesar 9,5% sedangkan untuk pajak hotel ( $X_2$ ) terhadap pendapatan asli daerah (Y) pengaruhnya lebih tinggi yaitu sebesar 10,9%. Jumlah pengaruh pajak reklame ( $X_1$ ) dan pajak hotel ( $X_2$ ) terhadap pendapatan asli daerah (Y) sebesar 20,4%.

Pajak reklame dan pajak hotel memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah dibuktikan dengan Nilai *RSquare* sebesar 0,170 atau 17%. Kemudian, untuk korelasi ganda pajak reklame mendapatkan hasil T hitung  $>$  T tabel ( $2,111 > 1,680$ ), maka  $H_0$  ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan antara pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan untuk korelasi ganda pajak hotel mendapatkan hasil nilai T hitung  $>$  T tabel ( $2,726 > 1,680$ ) maka  $H_0$  ditolak, artinya ada pengaruh yang signifikan antara pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah. Semakin tinggi penerimaan pajak reklame dan pajak

hotel maka akan semakin tinggi pula pendapatan asli daerahnya, karena t hitung dikategorikan positif.

Hasil pengolahan data dari responden menggunakan program SPSS 22 (*Statistic for Windows*), uji F mendapatkan hasil F hitung  $>$  F table yaitu ( $5.443 > 3.170$ ), maka  $H_0$  ditolak, artinya pajak reklame dan pajak hotel secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hipotesis  $H_0$  untuk pajak reklame dan pajak hotel ditolak dan  $H_a$  diterima artinya adanya pengaruh yang signifikan antara pajak reklame dan pajak hotel secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Melalui penjabaran tersebut, maka dapat disimpulkan pengaruh antara variabel pajak reklame dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyumas **dapat diterima**.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, maka saran yang dapat diberikan peneliti dalam penelitian ini yaitu, pemerintah daerah Kabupaten Banyumas sebaiknya mengoptimalkan pemungutan

pajak reklame dan pajak hotel karena kedua pajak tersebut berpotensi besar untuk berpengaruh lebih tinggi terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyumas hal ini disebabkan semakin banyak dan bertambahnya wajib pajak kedua pajak tersebut. Selain itu, jumlah investor dan meningkatnya wisatawan seharusnya juga mendorong tingginya penerimaan pajak reklame dan pajak hotel. Memperbaiki undang-undang Nomor 22 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan reklame yang sempat menuai polemik karena dianggap tidak fleksibel, dimana untuk titik, zonasi, dan ukurannya sudah diatur lebih mendetail lagi.

Meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak baik itu pajak reklame yang merupakan *official assessment* dan pajak hotel yang merupakan *self assessment*. Pengawasan terhadap wajib pajak reklame sebaiknya menambah jumlah personel untuk menertibkan reklame yang tidak sesuai aturan dan yang masa tayangnya sudah habis. Sedangkan untuk pajak hotel dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan kepada wajib pajak

dengan melalui pembentukan tim intensifikasi pajak daerah untuk meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban pajak di Kabupaten Banyumas.

Selain pajak reklame dan pajak hotel, masih ada sembilan pajak yang lain yang perlu diperhatikan, selain itu menggali dan mengelola sumber-sumber dari pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyumas sangatlah penting.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur :

- Adisasmita, Rahardjo.2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Adisasmita, Rahardjo.2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Anggara, Sahya. 2015. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Atmadja, Arifin P. Soeria. 2009. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum (Teori,Praktek, dan Kritik)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fahmi, Irham.2011. *Teori dan Manajemen Keuangan*: Yogyakarta: Alfabeta



- Hariani, Dyah.2013. *Azas-Azas Manajemen*. Semarang: CV.Majuno
- Hartati, Neneng dan Abdullah Boedi. *Pengantar Perpajakan*. 2015. Bandung: Pustaka Setia
- Halim dkk, 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Horne, James dan Wachowicz, John. 2012. *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Husnan, Pudjiastuti Enny, 2012. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: UPP STIM YKPN
- Idrus, Muhamad. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Erlangga
- Larasati, Endang.2007. *Keuangan Publik*. Semarang: Badan Penerbit
- Mardiasmo.2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Nasution. 2009. *Metode Research*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Nealoka. 2014. *Metode Penelitian dan Statistik*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Pasolong, Harbani.2014.*Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV.Alfabeta
- Prakosa, Bambang.2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press
- Prasetyo dan Jannah. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Siahaan, Pahala.2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sinambela, Lijan Poltak. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B*. Bandung : CV.Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B*. Bandung : CV.Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&B*. Bandung : CV.Alfabeta
- Suparmoko.2001. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset
- Suryani dan Hendryadi. (2015). *Metode Riset Kuantitatif*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Syafiie, Kencana.2009. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta
- T.Keban.2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori dan Isu)*. Yogyakarta: Gava Media
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Winardi.2009. *Promosi dan Reklame*. Bandung : Mandar Majul

Zain, Mohamad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

**Undang-Undang :**

Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Bupati No.66 tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Banyumas

Peraturan Bupati Banyumas No.64 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Banyumas

Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-undang Republik Indonesia N0.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

**Jurnal :**

Colins and Stephenson, 2017. *Taxing the Travelers: A Note on Hotel Tax Incidence*. West Virginia University and Berry Collage. Dalam :

[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwilrZTjsP\\_gAhVC63MBHWWW DUUQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Frap.scholasticahq.com%2Farticle%2F3701.pdf&usg=AOvVaw2-OC6ltS\\_b1JPPNnO\\_qYq0](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwilrZTjsP_gAhVC63MBHWWW DUUQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Frap.scholasticahq.com%2Farticle%2F3701.pdf&usg=AOvVaw2-OC6ltS_b1JPPNnO_qYq0)

diunduh pada pukul 21.35 tanggal 1-3-2019

Dewi Rufiana dkk. 2014. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Malang). Universitas Brawijaya. Dalam : <http://perpajakan.studentjournal.uib.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/296> diunduh pada pukul 13.24 tanggal 8-11-2018

Donald and William. 2008. *Origin and Early Development of Outdoor Advertising in the United States*. Montana State University. Dalam : <https://www.acrwebsite.org/search/view-conferenceproceedings.aspx?Id=12166> diunduh pada pukul 21.58 tanggal 14-11-2017

Franciska Carinda Sari . 2017. Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nganjuk (2013-2016). Dalam : [http://simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file\\_artikel/2017/dcc5288f422ef2cc3ba79da70ae989e8.pdf](http://simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file_artikel/2017/dcc5288f422ef2cc3ba79da70ae989e8.pdf) diunduh pada pukul 20.15 tanggal 23-3-2019

Handini Oktary dkk. 2014. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Sumatra Barat. Universita Bung Hatta. Dalam :

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjytICqic3eAhWHtY8KHU1pBbIQFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fjurnal.bunghatta.a.c.id%2Findex.php%3Fjournal%3DJFEK%26page%3Darticle%26op%3Dview%26path%255B%255D%3D7058&usg=AOvVaw1OI88T1q2i94PInncfDHNb> diunduh pukul 13.30 tanggal 9-11-2018

Kobandaha dan Wokas. 2016. Analisis Efektifitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotambagu. Universitas Sam Ratulangi. Dalam :  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1236> diunduh pada pukul 13.23 tanggal 9-11-2018

Nurmaafiyanti Dela. 2015. Pengaruh penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Cimahi (studi kasus pada dinas pendapatan daerah Kota Cimahi. Dalam :  
<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/5551> diunduh pada pukul 20.15 tanggal 23-3-2019

Widjaya, Susyanti dan Agus Salim, (2018), Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Reklame dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang Tahun 2015-2017  
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiM76V36DhAhVC6nMBHUV-AX4QFjAAegQIARAC&url=h>

[ttp%3A%2F%2Friset.unisma.a.c.id%2Findex.php%2Fjrm%2Farticle%2Fdownload%2F1293%2F1290&usg=AOvVaw1IGeIBqv0rvoCa2RhenbRB](http%3A%2F%2Friset.unisma.a.c.id%2Findex.php%2Fjrm%2Farticle%2Fdownload%2F1293%2F1290&usg=AOvVaw1IGeIBqv0rvoCa2RhenbRB) diunduh pada pukul 20.17 tanggal 23-3-2019

#### Website :

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwif> Diunduh pada 14 November 2017 Pukul 01.37 WIB

<http://bkd.banyumaskab.go.id/> Diunduh pada 11 November 2017 Pukul 22.48 WIB

<https://banyumaskab.bps.go.id/pencarian.html?searching=pajak&yt1=Cari> Diunduh pada tanggal 25 November 2017 Pukul 02.04 WIB

<https://mail.google.com/mail/u/0/#search/banyumas+dalam/161d60dda109a308> Diunduh pada 27 Februari 2018 pukul 15.00 WIB

<http://www.banyumasku.com/asal-nama-banyumas/> Diunduh pada 27 November 2018 pukul 23.03 WIB